

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan telah banyak bertransformasi seiring dengan perkembangan zaman. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang dan/atau jasa yang didasarkan atas kesepakatan bersama dan bukan melalui pemaksaan.<sup>1</sup> Kegiatan ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya perdagangan, antara lain untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan. Terdapat 2 (dua) jenis perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara, yaitu perdagangan dalam negeri (nasional) dan perdagangan luar negeri (internasional).<sup>2</sup> Perbedaan antara keduanya terletak pada batas wilayahnya, di mana perdagangan dalam negeri dilaksanakan antarwilayah di dalam suatu negara yang melibatkan proses kegiatan jual beli barang atau jasa dengan sistem perdagangan yang cakupannya hanya sebatas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak termasuk ke perdagangan luar negeri. Sementara itu, perdagangan luar negeri

---

<sup>1</sup> Agnesillia Sangga Payung Langi, Muhammad Natsir & Syamsul Anam. "Analisis Pemanfaatan Platform Media Sosial dalam Perdagangan Pakaian Jadi di Pertigaan Kampus Universitas." *Jurnal Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 18, No. 1 (2022): 26

<sup>2</sup> Rosyda Nur Fauziah, "Ciri-ciri Perdagangan Dalam Negeri dan Internasional." <https://www.gramedia.com/literasi/ciri-ciri-perdagangan-dalam-negeri-dan-internasional/>. Diakses pada 10 November 2023

merupakan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain melakukan perdagangan dalam bentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak.

Kegiatan impor sering dilakukan oleh sebuah negara karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki sekaligus untuk memperoleh barang dan jasa, teknologi modern, dan bahan baku produksi sehingga negara tersebut harus melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan lain dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.<sup>3</sup>

Penerapan kebijakan impor tentu dapat memberikan beberapa dampak positif bagi suatu negara.<sup>4</sup> Pertama, dengan adanya impor barang-barang konsumsi, kebutuhan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi dan tercapai kesejahteraan konsumen. Kedua, impor berdampak baik dalam meningkatkan industri dalam negeri. Karena negara mendapatkan kesempatan untuk mengimpor barang-barang modal, baik yang berupa mesin industri maupun bahan baku yang memungkinkan negara untuk mengembangkan industri dalam negerinya. Dampak positif yang terakhir, impor dapat mempercepat

---

<sup>3</sup> Serlika Aprita, et.al, *Hukum Perdagangan Internasional Cet-1*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2020), Hal. 18-19.

<sup>4</sup> Ibid.

terjadinya transfer teknologi. Kebijakan impor menstimulasi suatu negara secara bertahap untuk mengembangkan teknologi modern dengan tujuan mengejar ketertinggalannya dengan negara yang sudah maju.

Meskipun demikian, nyatanya kebijakan ini juga memiliki beberapa dampak negatif bagi perekonomian suatu negara.<sup>5</sup> Pertama, terancamnya penjualan produk dalam negeri. Ketika industri luar memiliki kualitas produksi barang yang tinggi dengan harga yang lebih terjangkau, maka konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk luar. Akibatnya, produk buatan lokal akan mengalami penurunan dalam jumlah penjualan karena pasar cenderung mencari barang dengan kualitas tinggi, tetapi harga terjangkau. Kedua, munculnya ketergantungan dengan negara importir. Hal ini disebabkan karena faktor produksi, yaitu teknologi di negara importir jauh lebih canggih sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Terlepas dari beragamnya dampak negatif dan positif kegiatan impor yang dilakukan dalam berbagai macam sektor industri di Indonesia, nyatanya impor tetap menjadi instrumen penting mengingat besarnya kebutuhan dalam negeri yang belum dapat tercukupi secara mandiri.<sup>6</sup>

Indonesia memiliki potensi pasar yang menjanjikan, salah satunya

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, Serafica Gischa, “*Alasan Indonesia Harus Mengimpor Barang-Barang Elektronik dan Otomotif.*” <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/19/150000969/alasan-indonesia-harus-mengimpor-barang-barang-elektronik-dan-otomotif>. Diakses pada 10 November 2023

dalam sektor elektronik dan telematika yang saat ini berkembang menjadi sektor primadona. Dilansir dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dalam 5 (lima) tahun terakhir, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Data ini memperlihatkan bahwa perkembangan indikator TIK yang paling pesat terlihat pada penggunaan internet dalam rumah tangga yang mencapai angka 78,18%.<sup>7</sup>

Meskipun kebutuhan akan alat elektronik di Indonesia terus meningkat, nyatanya industri alat komunikasi elektronik Indonesia masih kurang kompetitif dibandingkan dengan negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) lain, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.<sup>8</sup> Salah satu faktor yang menyebabkan kurang kompetitifnya industri alat elektronik Indonesia adalah perkembangan industri yang belum optimal dan ditunjukkan oleh masih tingginya angka impor produk elektronik.<sup>9</sup> Ketergantungan tinggi pada bahan baku dan bahan modal impor menjadi alasan permasalahan tersebut. Selain itu, produsen alat elektronik lokal cenderung hanya melakukan tahap perakitan di Indonesia, mengingat bahan baku dan bahan modal bukan berasal dari dalam negeri,

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, “*Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020*.” Hal. 19-20.

<sup>8</sup> Dhani Gunawan Idat, 2019, “Memanfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional.” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, No. 38 (2019): 7.

<sup>9</sup> Ismail, “*Prioritas Industri Substitusi Impor*.” <https://www.republika.co.id/berita/nizgdc9/prioritas-industri-substitusi-impor>. Diakses pada 10 November 2023.

melainkan produk hasil impor. Ditambah lagi, sebagian bahan baku dan komponen produk elektronika Indonesia masih menggunakan komponen dari Republik Rakyat Cina karena harganya yang lebih bersaing dibandingkan pemasok negara lain.<sup>10</sup>

Sebagai upaya menekan angka impor yang kian melambung, Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan kebijakan substitusi impor sejak masa awal kekuasaan Orde Baru pada periode 1970-an.<sup>11</sup> Substitusi impor adalah kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri.<sup>12</sup> Substitusi impor didasarkan pada anggapan bahwa sebuah negara harus mengurangi ketergantungannya pada negara asing dengan mengembangkan industri dalam negerinya. Tujuan substitusi impor antara lain untuk mendorong peningkatan konsumsi bahan baku dan bahan penolong lokal, memacu industri nasional dalam menginisiasi kekosongan pada struktur industri yang selama ini masih mengimpor, dan menciptakan jaringan rantai pasok dalam negeri (memperluas volume produksi dan kemampuan memasok).<sup>13</sup>

Industri merupakan penggerak utama perekonomian nasional, mengingat besarnya pengaruh yang diberikan terhadap pertumbuhan

---

<sup>10</sup> Verda Setiawan, “*Jokowi Mangkel! Timah RI No 2, tapi Diekspor Mentah ke China.*” [www.cnbcindonesia.com/news/20230204175517-4-411006/jokowi-mangkel-timah-ri-no-2-tapi-diekspor-mentah-ke-china](http://www.cnbcindonesia.com/news/20230204175517-4-411006/jokowi-mangkel-timah-ri-no-2-tapi-diekspor-mentah-ke-china). Diakses 10 November 2023

<sup>11</sup> Haryono Rinardi, “Industrialisasi di Indonesia: Perkembangan Industri Substitusi Impor Indonesia Selama Masa Orde Baru.” *Patrawidya*, Vol. 22, No. 1 (2021): 104.

<sup>12</sup> Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, “Konsep dan Teori Pembangunan.” *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, Modul 1: 43.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Produk Domestik Bruto (PDB), lapangan pekerjaan, devisa, dan transfer teknologi bagi suatu negara.<sup>14</sup> Berdasarkan data BPS selama 3 tahun terakhir, kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional selalu menjadi yang tertinggi, tahun 2020 sebesar 19,88%, tahun 2021 sebesar 19,25%, dan tahun 2022 sebesar 18,31%.<sup>15</sup> Melihat pengaruh signifikan industri, Pemerintah menyadari pentingnya struktur ekonomi yang berorientasi pada industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (PP 14/2015) yang berisi visi pembangunan industri nasional tahun 2035, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara dengan industri dalam negeri yang berdaya saing tinggi secara global dengan berlandaskan inovasi dan teknologi.<sup>16</sup> Implementasi visi tersebut dituangkan secara konkrit dalam sasaran pembangunan industri. Salah satu fokus utama yang ditargetkan yaitu meningkatkan kemampuan penguasaan pasar domestik dan global dengan menurunkan ketergantungan terhadap impor bahan penolong, bahan modal, dan bahan baku serta

---

<sup>14</sup> Jeshika, "Perkembangan Industri Nasional Menuju Industri Tangguh, 2035." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 8, No.1 (2019): 1767.

<sup>15</sup> BPS, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020." *Berita Resmi Statistik* No.13 (Februari 2021): 2; BPS, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021." *Berita Resmi Statistik* No.14 (Februari 2022): 2; BPS, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2022." *Berita Resmi Statistik* No.15 (Februari 2023): 3-4.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015, "Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035." Hal. 18

mengakselerasi kemampuan ekspor produk industri dalam negeri.<sup>17</sup> Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan substitusi impor dalam rangka mengembangkan industri dalam negerinya.

Kebijakan substitusi impor merupakan strategi pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengganti produk impor dengan produk dalam negeri dengan fokus meningkatkan produksi dalam negeri kemudian mengurangi ketergantungan produk impor sehingga dapat dikembangkan secara mandiri dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri.<sup>18</sup> Umumnya, kebijakan ini diimplementasikan negara berkembang terhadap industri dalam negeri yang tergolong *infant industry*.<sup>19</sup> *Infant industry* merupakan industri yang belum memiliki keunggulan produksi seperti pesaingnya dari negara lain, yang mampu memproduksi produk sejenis dengan lebih efisien, murah, dan berkualitas.<sup>20</sup> Dukungan pemerintah diperlukan, mengingat produk yang dihasilkan *infant industry* tidak dapat bersaing dengan produk impor sejenis yang memiliki harga lebih murah dan kualitas yang jauh lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut,

---

<sup>17</sup> Eni Susilowati, et.al, “Pengantar Ekonomi Pembangunan”, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022). Hal. 130.

<sup>18</sup> Bayu Nurpatra, Abdul Rivai Rais, dan Imam Supriadi, “Analisis Substitusi Impor Guna Mendukung Kemandirian Industri Kendaraan Taktis Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan Indonesia.” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 12, No. 2 (2022): 115;

Irina Ershova, et.al, “Development of a Strategy of Import Substitution,” *Procedia Economics and Finance* 39, (2016): 621.

<sup>19</sup> Esty Dewanti, “Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirements) Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Perjanjian Internasional Di Bidang Investasi,” *Jurnal Yuridika* 27, No. 3 (September 2012): 203-205.

<sup>20</sup> Syariful Anam dan Akhmad Solikin, “Dampak Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Proteksi Dan Daya Saing Produk Baja Lapis Aluminium Seng,” *Indonesian Treasury Review* 5, No. 3 (2020): 239.

penerapan kebijakan substitusi impor terhadap *infant industry* penting sampai industri tersebut mampu memproduksi produk yang berkualitas dan berdaya saing secara mandiri.<sup>21</sup>

Terkait kebijakan substitusi impor Indonesia, Pemerintah merumuskan peta jalan “*Making Indonesia 4.0*” pada tahun 2018 silam dengan fokus pengembangan 5 sektor industri yang dinyatakan prioritas, yaitu sektor Industri Elektronika dan Telematika (IET), kimia, tekstil, otomotif, serta makanan dan minuman.<sup>22</sup> Berdasarkan data BPS (2022), IET berkontribusi sebesar 1,57% terhadap PDB nasional.<sup>23</sup> Pembangunan 5 sektor industri prioritas ini ditarget untuk menjadikan Indonesia sebagai negara 10 besar dunia dengan ekonomi terkuat berdasarkan PDB dan mewujudkan 10 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030.<sup>24</sup>

Pengembangan IET dalam negeri diaplikasikan melalui penguatan struktur industri dengan meningkatkan investasi asing dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).<sup>25</sup> Pemerintah menilai bahwa industri IET memiliki potensi strategis dari pasar domestik yang besar dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta,

---

<sup>21</sup> Mehdi Shafaeddin, “*What Did Frederick List Actually Say? Some Clarifications on the Infant Industry Argument.*” UNCTAD/OSG/DP/149, (July 2000): 7-8.

<sup>22</sup> Kementerian Perindustrian, “*Making Indonesia 4.0*”, 2018, Hal. 6.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Kemenperin, “*Revolusi Industri 4.0 Indonesia.*” *Making Indonesia 4.0*, (2018): 61.10  
Kemenperin, “*Dukung P3DN dan Transformasi Digital, Kemenperin “Setrum” Industri Elektronik.*” Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, diakses tanggal 18 Agustus 2023, <https://kemenperin.go.id/artikel/24253>.

<sup>25</sup> Kemenperin, “*Revolusi Industri.*” Hal. 57.



potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai bahan baku dan komponen, serta mulai masuknya industri kelas dunia ke Indonesia.<sup>26</sup> Untuk memperkuat implementasi *Making Indonesia 4.0*, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Permenperin 15/2020) yang menitikberatkan pada penguatan struktur industri IET.<sup>27</sup> Akan tetapi, *Making Indonesia 4.0* dan Permenperin 15/2020 belum spesifik mencantumkan substitusi impor sebagai kebijakan untuk memperkuat struktur industri IET. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Tahun 2020-2024 (PSD ILMATE 1/2020) yang menyatakan bahwa penguatan struktur IET harus dilakukan melalui substitusi impor dalam sasaran strategisnya.<sup>28</sup>

Sebagai salah satu aturan pelaksana PSD ILMATE 1/2020, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika Tahun 2023 (PERKIN ILMATE) menargetkan substitusi impor IET sebesar 35% pada tahun 2023. Target tersebut direncanakan sebagai tindak lanjut atas 25 kelompok produk

---

<sup>26</sup> Lampiran PSD ILMATE 1/2020.

<sup>27</sup> Lampiran Permenperin 15/2020.

<sup>28</sup> Lampiran PSD ILMATE 1/2020.

IET yang diprioritaskan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk dilakukan substitusi impor, salah satunya adalah produk jadi telepon seluler.<sup>29</sup> Menurut Kemenperin, produk jadi telepon seluler menyumbang nilai impor yang relatif tinggi yang terlihat dari data BPS (2021), nilai impor produk jadi telepon seluler berada di urutan kedua tertinggi (di bawah produk laptop) sebesar USD 0,83 miliar atau 11,47%.<sup>30</sup> Selain produk jadi telepon seluler, komponen telepon seluler juga merupakan produk IET dengan nilai impor tertinggi sejak tahun 2018, di mana terdapat peningkatan impor sebesar 10,8% dengan nilai impor mencapai USD 4,35 miliar pada tahun 2020.<sup>31</sup>

Meskipun Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor produk jadi telepon seluler dan komponen telepon seluler, sebenarnya Indonesia mampu memproduksi komponen telepon seluler yang terlihat sejak diberlakukan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) telepon seluler pada tahun 2015.<sup>32</sup> Namun Indonesia belum dapat memproduksi komponen-komponen pada telepon seluler secara mandiri. Karena belum cukupnya kualitas SDM pada industri telepon seluler untuk menghasilkan komponen dan masih sedikitnya industri pemasok komponen telepon seluler. Salah satu

---

<sup>29</sup> Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, "Analisis Kebijakan Pengendalian Impor Produk Industri Elektronika Dan Telematika," Badan Kebijakan Perdagangan, (Juni 2022): 3-4.

<sup>30</sup> Perdagangan, "Pengendalian Impor." Hal. 9-10.

<sup>31</sup> Kemenperin, "Tantangan Peningkatan Kinerja Industri Elektronika di Indonesia." Buku Analisis Pembangunan Industri 5, (2021): 23.

<sup>32</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "PP 39 Kementerian Perindustrian Triwulan IV Tahun 2022." Hal. 57

solusi untuk menyelesaikan permasalahan kualitas SDM pada industri telepon seluler adalah penerapan transfer teknologi.

Upaya untuk merealisasikan transfer teknologi terhadap SDM industri telepon seluler dapat dilakukan apabila terdapat kebijakan investasi yang menarik, terutama kepada investor asing. Hal ini selaras dengan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, di mana salah satu fokus utama substitusi impor telepon seluler adalah dengan gencar menarik Penanaman Modal Asing (PMA) perusahaan terkemuka dunia yang berorientasi kepada transfer teknologi kepada tenaga kerja lokal. Melalui strategi tersebut, pemanfaatan teknologi asing diharapkan dapat mengembangkan kemandirian industri telepon seluler dalam negeri.<sup>33</sup> Beberapa permasalahan terkait implementasi kebijakan TKDN salah satunya karena masih rendahnya pemenuhan TKDN dan juga kebijakan investasi yang menghambat PMA, seperti rumit dan lamanya birokrasi perizinan berusaha, ketidakpastian ketersediaan lahan, dan kurang optimalnya implementasi regulasi pendukung terkait isu lingkungan.<sup>34</sup> Sangat disayangkan realisasi TKDN telepon seluler masih belum optimal, padahal Indonesia memiliki cadangan bahan

---

<sup>33</sup> Kemenperin, “Revolusi Industri,” 59.

<sup>34</sup> P3DN, “Daftar Inventarisasi Barang/ Jasa Produksi Dalam Negeri.” <https://tkdn.kemenperin.go.id/search.php?where=produk&what=telepon+seluler><sup>+</sup>. Diakses pada 29 Oktober 2023; Danur Lambang Priandaru, “Isu Lingkungan di Indonesia Bikin Gentar Investor Asing.” <https://www.kompas.com/global/read/2023/04/01/101500370/isu-lingkungan-di-indonesia-bikin-gentar-investor-asing>. Diakses pada 20 Agustus 2023

baku timah yang besar.<sup>35</sup>

Apabila substitusi impor melalui TKDN pada telepon seluler dapat dilaksanakan secara optimal, terdapat beberapa dampak positif dari kebijakan substitusi impor di industri telepon seluler. Beberapa dari dampak tersebut adalah masuknya investasi atau PMA dan terjadinya peningkatan angka ekspor.<sup>36</sup>

Dengan latar belakang di atas, maka penulis melihat bahwa topik ini menarik untuk dikaji melihat potensi yang dimiliki oleh industri telepon seluler di Indonesia yang berjudul “Pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Produk Jadi Telepon Seluler Sebagai Faktor Pendorong Pengolahan Timah Dalam Negeri Ditinjau Dari Program Pemerintah *Making Indonesia 4.0*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peraturan kewajiban TKDN telepon seluler dapat dioptimalisasi guna mendorong hilirisasi timah di Indonesia?
2. Bagaimana iklim investasi di Indonesia dapat ditingkatkan guna mengembangkan industri komponen telepon seluler dalam negeri?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>35</sup> Mohammad Hamsal, “*Hilirisasi Hasil Tambang Timah Masih Lemah.*”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/21/hilirisasi-hasil-tambang-timah-masih-lemah>. Diakses pada 10 November 2023.

<sup>36</sup> Sucofindo, “*5 Manfaat Penerapan Sertifikasi TKDN bagi Perusahaan.*” <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/umum/sertifikasi-13/manfaat-penerapan-sertifikasi-tkdn-bagi-perusahaan/>. Diakses pada 10 November 2023

Melihat kondisi industri telepon seluler dan timah di Indonesia, dan melihat potensi penerapan instrumen substitusi impor yaitu TKDN pada industri telepon seluler di Indonesia yang dapat mendorong adanya hilirisasi timah di Indonesia, serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menghambat maupun timbul pada penerapan TKDN dilaksanakan dari sudut pandang investor asing.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan bagi para peneliti lain pada konsep yang sejenis untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan jalan keluar penerapan TKDN pada produk telepon seluler dan hilirisasi timah di Indonesia.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Memberikan sumbangsih ide bagi negara dalam hal penerapan TKDN pada industri telepon seluler di Indonesia beserta dengan mekanismenya agar dapat meningkatkan ekonomi negara serta memandirikan industri telepon seluler dalam negeri.
- b. Memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai konsep penerapan TKDN pada produk-produk terutama telepon seluler dengan harapan adanya pertimbangan

realisasi substitusi impor yang optimal pada industri telepon seluler Indonesia serta mewujudkan hilirisasi timah di Indonesia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**, bab ini terdiri dari tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang menjadi dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian.

**BAB 3 METODE PENELITIAN**, dalam bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metodenya terbagi antara jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, analisis data.

**BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**, bab ini merupakan gambaran atas hasil penelitian dan analisis yang dilakukan secara kepustakaan.

**BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**, bab ini merupakan kesimpulan dan saran atas keseluruhan penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan akan mengemukakan jawaban atas masalah yang terdapat dalam penelitian sedangkan saran akan berisikan masukan/ solusi untuk mengatasi masalah yang dibahas dalam penelitian.